

BAB II

KAJIAN KONSEPTUAL

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan kajian penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya yang memiliki keterkaitan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Penelitian terdahulu juga digunakan sebagai referensi dalam mengkaji penelitian yang dilakukan oleh peneliti dan didapat dari sumber ilmiah seperti skripsi, tesis, disertasi, atau jurnal penelitian. Berikut adalah penelitian terdahulu yang menjadi acuan peneliti dalam melakukan penelitian:

1. “Bahasa Isyarat dalam Program Berita Televisi di TVONE dan TVRI”. 2017. Nurhikmah Yuliasuti. Skripsi. Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kebijakan penggunaan translasi bahasa isyarat, proses pelaksanaan translasi bahasa isyarat, serta mengetahui bagaimana tanggapan khalayak. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan paradigma potpositivisme. Penelitian ini menggunakan *purposive sampling* dengan informannya yaitu informan kunci dan informan pendukung. Teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti yaitu teknik wawancara, observasi, studi dokumentasi, dan studi pustaka. Peneliti menggunakan teknik analisis data berupa reduksi data, penyajian data, dan menarik kesimpulan/verifikasi. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa kebijakan penggunaan translasi bahasa isyarat di TVONE masih berdasarkan arahan dari Komisi Penyiaran Indonesia dengan

translasi bahasa isyarat yang tidak seluruhnya dipahami oleh penyandang disabilitas sensorik rungu-wicara dikarenakan BISINDO yang digunakan sehari-hari oleh teman tuli berbeda di setiap daerahnya. Sedangkan kebijakan penggunaan translasi bahasa isyarat di TVRI merupakan kerjasama dengan Kementerian Sosial Republik Indonesia dan untuk mewujudkan peran TVRI sebagai TV Publik untuk menyajikan informasi kepada masyarakat dari berbagai kalangan termasuk dari kalangan disabilitas. Namun, tanggapan dari penyandang disabilitas sensorik rungu-wicara mengungkapkan jika translasi bahasa isyarat di TVRI tidak dapat dimengerti secara keseluruhan karena kotak translasi bahasa isyarat yang terlalu kecil dan menggunakan SIBI.

Penelitian pertama memiliki kesamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu mengenai aksesibilitas informasi bagi penyandang disabilitas sensorik rungu-wicara dalam bentuk video yang dilakukan oleh program siaran televisi TVONE dan TVRI yang menjadi salah satu sumber informasi. Walaupun penelitian ini berfokus pada kebijakan translasi bahasa isyarat di program televisi, tetapi pada pelaksanaan *in-dept interview* dengan penyandang disabilitas sensorik rungu-wicara terdapat tanggapan mengenai translasi bahasa isyarat yang aksesibel untuk penyebaran informasi dalam bentuk video khususnya di program penyiaran stasiun televisi. Penelitian pertama memiliki perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu dibagian metode penelitian, sasaran, dan beberapa aspek yang menjadi permasalahan

penelitian. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian pertama adalah metode kualitatif dengan informan kunci dan informan pendukung baik dari pihak TVRI, TVONE, Komisi Penyiaran Indonesia, Kementerian Sosial Republik Indonesia, dan penyandang disabilitas sensorik rungu-wicara. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti menggunakan metode kuantitatif dengan responden anggota Gerkatina Kebumen. Penelitian pertama meneliti tentang kebijakan translasi bahasa isyarat, proses translasi bahasa isyarat, dan tanggapan khalayak penyandang disabilitas sensorik rungu-wicara terhadap translasi bahasa isyarat yang di dalamnya memuat aksesibilitas penyebaran informasi dalam bentuk video oleh stasiun televisi, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti berfokus pada aksesibilitas informasi secara keseluruhan baik dalam bentuk audio, video, gambar, ataupun teks.

2. *“Information Accessibility for Students with Disabilities: An Exploratory Study of Pakistan”*. 2015. Sania Awais dan Kanwal Ameen. *Jurnal. University of Punjab*.

Penelitian ini bertujuan untuk memahami pengalaman siswa yang merupakan penyandang disabilitas dalam hubungannya dengan aksesibilitas informasi di layanan perpustakaan sekolah, seperti untuk mengetahui fasilitas perpustakaan yang menerapkan aksesibilitas informasi bagi siswa yang merupakan penyandang disabilitas, untuk mengidentifikasi tantangan yang dihadapi oleh siswa yang merupakan penyandang disabilitas dalam mendapatkan informasi, dan untuk mengidentifikasi tantangan yang dihadapi oleh petugas perpustakaan dalam menyediakan akses informasi

kepada siswa berkebutuhan khusus. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan menggunakan *purposive sampling* dengan informan yang merupakan siswa penyandang disabilitas dengan ragam disabilitas sensorik netra, sensorik rungu, dan disabilitas fisik, serta petugas perpustakaan di sekolah luar biasa dan perguruan tinggi inklusif di kota Lahore, Provinsi Punjab, Pakistan. Teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti adalah wawancara dan observasi. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa siswa penyandang disabilitas tidak memiliki akses yang sama ke bahan bacaan dan sumber informasi lainnya di perpustakaan, satu-satunya dukungan dan sumber informasi utama mereka berasal dari anggota keluarga dan guru.

Penelitian kedua memiliki kesamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu mengenai aksesibilitas informasi bagi penyandang disabilitas yang salah satunya adalah penyandang disabilitas sensorik rungu. Penelitian kedua menggunakan metode penelitian kualitatif dengan informan yaitu siswa yang merupakan penyandang disabilitas sensorik netra, disabilitas sensorik rungu-wicara, dan disabilitas fisik di SLB dan perguruan tinggi inklusif di Pakistan. Penelitian yang dilakukan oleh peneliti menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan responden anggota Gerkatina Kebumen.

3. “Pencarian informasi melalui Televisi dan Film oleh Tunarungu di Sumedang”. 2021. Azmah Tafwidli Rahmi, Santi Susanti, Herlina Agustin. Jurnal. Universitas Padjadjaran.

Penelitian ketiga dilakukan oleh Azmah Tafwidli Rahmi, Santi Susanti, dan Herlina Agustin yang berjudul “Pencarian informasi melalui Televisi dan Film oleh Tunarungu di Sumedang” pada tahun 2021. Penelitian ini bertujuan mengungkapkan motif yang mendorong anggota Gerakan untuk Kesejahteraan Tunarungu Indonesia (Gerkatin) Kabupaten Sumedang membutuhkan informasi dari televisi dan film, serta upaya yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan informasi tersebut. Metode penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi yang relevan dengan penelitian. Analisis data dilakukan menggunakan metode analisis data interaktif Miles dan Huberman. Pemilihan informan dilakukan melalui teknik purposive sampling yang terdiri dari pengurus dan anggota Gerkatin Sumedang, serta orang-orang terdekat informan disabilitas sensorik rungu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemenuhan kebutuhan informasi melalui televisi dan film pada disabilitas sensorik rungu di Gerkatin Sumedang digerakkan oleh motivasi internal dan eksternal berdasarkan sepuluh faktor kebutuhan berbeda pada setiap individu, antara lain kebutuhan akan hiburan, informasi dan pekerjaan. Pemenuhan kebutuhan informasi melalui film dilakukan dengan menonton di bioskop dan Youtube. Informasi di televisi dan film masih sulit diakses, karena kurangnya ketersediaan juru bahasa isyarat serta

teks di dalam setiap tayangan televisi dan film di bioskop. Oleh karena itu, teman tuli di Gerkatina Kabupaten Sumedang berharap adanya teks film dan Juru Bahasa Isyarat dalam setiap tayangan film, agar film Indonesia menjadi ramah bagi disabilitas sensorik runtu.

Penelitian ketiga memiliki kesamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu mengenai aksesibilitas informasi dalam bentuk video bagi penyandang disabilitas sensorik runtu di Gerkatina daerah. Penelitian ketiga menggunakan metode penelitian kualitatif, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti menggunakan metode kuantitatif.

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No.	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan dan Perbedaan
1.	Nurkhikmah Yuliasuti	Translasi Bahasa Isyarat dalam Program Berita di TVOne dan TVRI	Kualitatif	Kebijakan pelaksanaan translasi bahasa isyarat dalam program berita TVOne merupakan arahan dari Komisi Penyiaran Indonesia sedangkan TVRI sesuai dengan kontrak kerjasama dengan Kemensos, Tanggapan dari khalayak tunarungu jika translasi bahasa isyarat sulit dipahami untuk mendapat informasi dari televisi.	<p>Persamaan: Di dalamnya memuat kenyataan aksesibilitas informasi bagi penyandang disabilitas sensorik rungu dalam bentuk video.</p> <p>Subjek penelitian yang merupakan penyandang disabilitas sensorik rungu.</p> <p>Perbedaan: Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan <i>in-dept interview</i> dan berfokus pada kebijakan translasi bahasa isyarat untuk akses informasi dengan bentuk video bagi tunarungu. Sedangkan penelitian yang dilakukan peneliti menggunakan metode kuantitatif dengan teknik pengumpulan data menggunakan angket dan berfokus pada aksesibilitas informasi secara</p>

					keseluruhan yaitu dalam bentuk audio, video, gambar, dan teks.
2.	Sania Awais dan Kanwal Ameen	<i>Information Accessibility for Students with Disabilities: An Exploratory Study of Pakistan</i>	Kualitatif	Hasil penelitian menyebutkan jika siswa penyandang disabilitas tidak memiliki akses yang sama ke bahan bacaan dan sumber informasi lainnya di perpustakaan, satu-satunya dukungan dan sumber informasi utama mereka berasal dari anggota keluarga dan guru.	<p>Persamaan: Variabel yang diteliti yaitu aksesibilitas informasi bagi penyandang disabilitas</p> <p>Perbedaan: Penelitian kedua berfokus pada tantangan yang dihadapi siswa yang merupakan penyandang disabilitas untuk mengakses informasi dan tantangan petugas perpustakaan untuk menyediakan informasi ke siswa berkebutuhan khusus.</p> <p>Metode penelitian kedua menggunakan kualitatif sedangkan peneliti menggunakan kuantitatif.</p> <p>Tempat penelitian kedua berada di perpustakaan sekolah/ perguruan tinggi inklusif di Kota Lahore sedangkan peneliti meneliti di Gerkatin Kebumen.</p> <p>Subjek penelitian kedua adalah siswa yang merupakan penyandang</p>

					disabilitas sensorik rungu, sensorik netra, dan disabilitas fisik. Sedangkan peneliti meneliti penyandang disabilitas sensorik rungu.
3.	Azmah Tafwidli Rahmi, Santi Susanti, dan Herlina Agustin	Pencarian Informasi melalui Televisi dan Film oleh Tunarungu di Sumedang	Kualitatif	Pemenuhan kebutuhan informasi masih sulit diakses karena kurangnya ketersediaan juru bahasa isyarat serta teks dalam setiap tayangan televisi dan film di bioskop.	<p>Persamaan: Di dalamnya memuat aksesibilitas informasi dalam bentuk video (tayangan televisi dan film di bioskop)</p> <p>Subjek penelitian yaitu penyandang disabilitas sensorik rungu di Gerkatina daerah.</p> <p>Perbedaan: Metode penelitian ketiga menggunakan metode kualitatif sedangkan peneliti menggunakan metode kuantitatif.</p>

B. Teori yang Relevan dengan Penelitian

1. Penyandang Disabilitas

a. Pengertian

Menurut WHO (1980) ada tiga definisi yang berkaitan dengan disabilitas, yaitu “*impairment, disability, dan handicap*”. Soleh (2014:6) mendefinisikan tiga definisi yang berkaitan dengan disabilitas sebagai berikut:

Impairment adalah kehilangan atau abnormalitas struktur atau fungsi psikologis, fisiologis atau anatomis. *Disability* adalah suatu keterbatasan atau kehilangan kemampuan (sebagai akibat *impairment*) untuk melakukan suatu kegiatan dengan cara atau dalam batas-batas yang dipandang normal bagi seorang manusia. *Handicap* adalah suatu kerugian bagi individu tertentu, sebagai akibat dari suatu *impairment* atau *disability*, yang membatasi atau menghambat terlaksananya suatu peran yang normal.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas pada Pasal 1 Ayat (1) menyebutkan bahwa penyandang disabilitas adalah

Setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga lainnya berdasarkan kesamaan hak.

Dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa penyandang disabilitas adalah individu yang memiliki keterbatasan atau ketidakmampuan baik fisik, intelektual, mental, sensorik dan/ atau disabilitas ganda sehingga menghambat peran dan partisipasinya di lingkungan sosial. Individu tersebut termasuk dalam kelompok rentan

yang harus diberikan kesetaraan hak yang sesuai dengan kekhususannya.

b. Ragam Disabilitas

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas pada Pasal 4 Ayat (1) menyebutkan ragam penyandang disabilitas meliputi “penyandang disabilitas fisik, penyandang disabilitas intelektual, penyandang disabilitas mental, dan penyandang disabilitas sensorik”. Ragam penyandang disabilitas dapat dialami secara tunggal, ganda, atau multi. Berikut penjelasan dari masing-masing ragam penyandang disabilitas:

1) Penyandang Disabilitas Fisik

Penyandang disabilitas fisik adalah individu yang mengalami kondisi abnormal pada fungsi gerak anggota tubuh akibat dari amputasi, lumpuh, paraplegi, *cerebral palsy (CP)*, stroke, kusta, dan kerdil (orang kecil).

2) Penyandang Disabilitas Intelektual

Penyandang disabilitas intelektual adalah individu yang terganggu fungsi pikirnya akibat dari tingkat kecerdasan yang di bawah rata-rata seperti lambat belajar, disabilitas grahita, dan *down syndrome*.

3) Penyandang Disabilitas Mental

Penyandang disabilitas mental adalah individu yang mengalami gangguan klinis yang meliputi aspek kognisi, kontrol

emosi, dan perilaku seperti *Autism Spectrum Disorder* (ASD), gangguan pemusatan perhatian dan perilaku hiperaktif, dan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ).

4) Penyandang Disabilitas Sensorik

Penyandang disabilitas sensorik adalah individu yang terganggu salah satu fungsi panca inderanya seperti disabilitas sensorik netra, disabilitas sensorik rungu dan/ atau disabilitas sensorik wicara.

2. Penyandang Disabilitas Sensorik Rungu

Penelitian yang akan dilakukan berfokus pada penyandang disabilitas sensorik yaitu disabilitas sensorik rungu. Menurut Murni Winarsih dalam Tjahyanti (2019:45) penyandang disabilitas sensorik rungu merupakan

Seseorang yang mengalami kekurangan atau kehilangan kemampuan mendengar baik sebagian atau seluruhnya yang diakibatkan oleh tidak berfungsinya sebagian atau seluruh alat pendengaran, sehingga ia tidak dapat menggunakan alat pendengarannya dalam kehidupannya sehari-hari, yang berdampak terhadap kehidupannya secara kompleks terutama pada kemampuan berbahasa sebagai alat komunikasi yang sangat penting.

Berdasarkan pengertian tersebut penyandang disabilitas sensorik rungu merupakan seseorang yang memiliki keterbatasan indera pendengarnya baik sebagian atau seluruhnya sehingga berdampak pada kehidupan sehari-hari seperti kemampuan berbahasa atau berbicara yang di bawah batas normal manusia pada umumnya.

Pelaksanaan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas di atur di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Pelaksanaan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas di antaranya berasaskan penghormatan terhadap martabat, tanpa diskriminasi, kesamaan kesempatan, inklusif, dan aksesibilitas. Hal tersebut salah satunya bertujuan untuk mewujudkan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak asasi manusia serta kebebasan dasar penyandang disabilitas secara penuh dan setara. Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas pasal 5 menyebutkan bahwa penyandang disabilitas memiliki

hak hidup; bebas dari stigma; privasi; keadilan dan perlindungan hukum; pendidikan; pekerjaan, kewirausahaan, koperasi; kesehatan; politik; keagamaan; keolahragaan; kebudayaan dan pariwisata; kesejahteraan sosial; aksesibilitas; pelayanan publik; perlindungan dari bencana; habilitasi dan rehabilitasi; konsesi; pendataan; hidup secara mandiri dan dilibatkan dalam masyarakat; berekspresi, berkomunikasi, dan memperoleh informasi; berpindah tempat kewarganegaraan; dan bebas dari tindakan diskriminasi, penelantaran, penyiksaan, serta eksploitasi.

Dalam penjelasan di atas, penyandang disabilitas memiliki hak aksesibilitas dan hak berekspresi, berkomunikasi, serta memperoleh informasi. Hak aksesibilitas untuk penyandang disabilitas meliputi hak mendapatkan aksesibilitas memanfaatkan fasilitas publik dan mendapatkan akomodasi yang layak. Hak berekspresi, berkomunikasi, dan memperoleh informasi untuk penyandang disabilitas salah satunya adalah hak untuk mendapatkan informasi dan berkomunikasi melalui media yang mudah diakses, menggunakan serta memperoleh fasilitas informasi dan

komunikasi yang salah satunya berupa bahasa isyarat. Hak penyandang disabilitas telah diatur secara fundamental oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, yang salah satunya adalah aksesibilitas untuk memperoleh informasi melalui berbagai media.

3. Aksesibilitas Informasi

Konvensi PBB tentang Hak Penyandang Disabilitas pada pasal 9 menyebutkan jika aksesibilitas dipahami sebagai,

Tindakan yang tepat untuk memastikan akses bagi penyandang disabilitas atas dasar kesetaraan dengan orang lain terhadap lingkungan fisik, transportasi, informasi dan komunikasi yang di dalamnya memuat teknologi dan sistem informasi dan komunikasi, fasilitas atau layanan lain yang terbuka untuk umum, baik di perkotaan maupun di pedesaan. (*United Nations*, 2006, hal.8)

Konsep di atas adalah konsep luas dari aksesibilitas yang mencakup banyak faktor lingkungan dan fisik. Peneliti akan berfokus pada aksesibilitas informasi. Informasi sendiri menurut Anggraeni dan Irviani (2017:13) adalah “sekumpulan data atau fakta yang diorganisasi atau diolah dengan cara tertentu sehingga mempunyai arti bagi penerima”.

United Nations on The Rights of Persons with Disabilities menyebutkan bahwa “aksesibilitas informasi dipahami sebagai informasi yang disediakan dalam format yang memungkinkan setiap pengguna dan pelajar untuk mengakses konten atas dasar kesetaraan dengan orang lain”.

Guidelines for Accessible Information (2015:8) menyebutkan bahwa

Aksesibilitas informasi yang dapat diakses idealnya adalah informasi yang memungkinkan semua penerimanya untuk dengan mudah mengorientasikan diri mereka sendiri ke dalam konten dan dapat dirasakan serta dipahami secara efektif melalui perspektif yang berbeda seperti ketika menggunakan mata, telinga, dan jari.

Aksesibilitas informasi yang dapat diakses secara penuh oleh setiap penerimanya merupakan cita-cita yang tidak mudah dicapai. Namun, teknologi memungkinkan pembuat konten untuk membuat dan membagikan informasi dengan konten yang dapat diadaptasi oleh semua penerimanya, yang berarti penerima informasi dapat mengubah bentuk konten sesuai dengan kebutuhan mereka.

Guidelines for Accessible Information mengambil pendekatan inklusif di mana informasi harus dapat diakses oleh setiap ragam disabilitas dengan kondisi tertentu atau informasi tersebut harus dapat diakses secara universal. *Guidelines for Accessible Information* ini mengharapkan pedomannya dapat menjadi titik awal yang dapat dipertimbangkan dan divalidasi pembuat informasi untuk menghasilkan informasi yang dapat diakses ke sumber yang lebih terperinci seperti deskripsi, tutorial, dan rekomendasi. *Guidelines for Accessible Information* (2015:10) menyebutkan “aksesibilitas informasi dapat tercapai jika informasi dengan jenis berbeda seperti informasi dalam bentuk teks, audio, video, dan gambar dapat diakses”. *Guidelines for Accessible Information* dibuat untuk menjelaskan langkah-langkah membuat informasi dengan jenis yang berbeda tetapi tetap dapat diakses secara universal oleh semua orang khususnya penyandang disabilitas. *Guidelines for Accessible Information* (2015:12) membuat langkah-langkah membuat informasi dengan jenis yang berbeda seperti “bagaimana cara membuat audio, video, gambar, dan teks

Anda dapat diakses”. Penjelasan terhadap langkah-langkah tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana membuat informasi berbentuk audio dapat diakses yaitu dengan menyediakan keterangan di berkas audio tersebut terhadap isi dari informasi yang akan disampaikan. Pembuat informasi dengan bentuk audio diusahakan dapat menyediakan kontrol volume, menyediakan fungsi mempercepat, memundurkan, dan menjeda audio. Penerima informasi diusahakan untuk tidak mengaktifkan pemutaran otomatis. Informasi berbentuk audio harus memberikan fitur *bookmark* agar mempermudah pencarian informasi ketika akan diputar ulang.
- b. Bagaimana membuat informasi berbentuk video dapat diakses yaitu dengan menyediakan takarir yang sesuai dengan kondisi yang ada pada video. Pemutar video harus memiliki fitur mempercepat, memundurkan, dan menjeda. Informasi dalam bentuk video diusahakan dapat diputar di pemutar media yang berbeda untuk menghindari pemutar video yang tidak akses takarir. Penerima informasi diusahakan untuk tidak mengaktifkan pemutaran otomatis.
- c. Bagaimana membuat informasi berbentuk gambar dapat diakses yaitu dengan membuat gambar yang menyediakan keterangan baik di dalam gambar atau di berkas gambar tersebut. Cara selanjutnya yaitu dengan menghindari gambar untuk mewakili kalimat yang menjadi isi informasi. Informasi dalam bentuk gambar dapat dibuat dengan menggunakan kontras warna yang sesuai antara warna latar belakang

dengan warna teks dalam gambar serta menghindari penggunaan warna merah, hijau, kuning, dan abu-abu. Gambar harus dapat di *zoom in* dan *zoom out* menyesuaikan kebutuhan.

- d. Bagaimana membuat informasi berbentuk teks dapat diakses yaitu dengan membuat teks tersebut dengan menggunakan bahasa paling sederhana yang sesuai atau bahasa baku yang dipahami oleh seluruh kalangan. Ukuran font minimal 12 dengan *font* yang dirancang khusus untuk dapat dibaca oleh layar seperti Arial. Informasi berbentuk teks diusahakan untuk menghindari penggunaan singkatan dan akronim. Pembuat informasi harus memperhatikan penggunaan warna teks dan penggunaan huruf tebal dan huruf miring. Jika memungkinkan, pembuat informasi dapat membuat ringkasan dari konten/ isi informasi dan membuat catatan kaki untuk kosa kata tertentu untuk memperjelas informasi.

Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 9 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas pasal 1 ayat (18) menyebutkan tentang aksesibilitas adalah “kemudahan yang disediakan bagi Penyandang Disabilitas guna mewujudkan Kesamaan Kesempatan”. Penyandang disabilitas juga memiliki hak aksesibilitas yang dimuat pada Perda tersebut yang meliputi aksesibilitas untuk memanfaatkan fasilitas publik dan mendapatkan akomodasi yang layak sebagai bentuk aksesibilitas bagi individu meliputi aksesibilitas fisik dan aksesibilitas non fisik. Aksesibilitas informasi sendiri

termasuk ke dalam aksesibilitas non fisik di mana pelayanan informasi berupa upaya penjelasan melalui media yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan Penyandang Disabilitas dalam hal pelayanan publik, menggunakan fasilitas yang ada pada bangunan umum, sarana lalu lintas, sarana komunikasi, dan angkutan umum.

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa aksesibilitas informasi merupakan pemberian informasi dalam bentuk format atau media berbeda seperti audio, video, gambar, dan teks yang dapat diakses penerima informasi dalam kondisi yang berbeda-beda sesuai dengan ragam disabilitasnya atas dasar kesetaraan dengan masyarakat secara umum.

4. Praktik Pekerjaan Sosial dengan Disabilitas

Pekerja sosial dengan disabilitas berfokus untuk memberikan pelayanan dan intervensi terhadap penyandang disabilitas untuk mencapai keberfungsian sosial. Keberfungsian sosial yang dimaksud mengacu pada cara yang dilakukan individu untuk melaksanakan tugas kehidupan untuk memenuhi kebutuhannya. Pekerja sosial dalam melakukan intervensi dengan penyandang disabilitas harus bekerja sama dengan profesi lain seperti dokter, psikolog, juru bahasa isyarat, dan profesional lainnya yang sesuai dengan kebutuhan dan permasalahan penyandang disabilitas.

Menurut Dorang Luhpuri dan Rini Hartini Rinda Andayani (2019:122), profesi pekerjaan sosial melakukan intervensi terhadap permasalahan disabilitas dengan melakukan hal-hal berikut yaitu

“mengurangi hambatan dari lingkungan (fisik), menghilangkan hambatan sosial, meningkatkan partisipasi penyandang disabilitas, dan membuat seluruh layanan masyarakat dan kebijakan responsif dan inklusif”.

Hal-hal yang dapat dilakukan oleh profesi pekerjaan sosial untuk melakukan intervensi terhadap permasalahan disabilitas di atas dijelaskan lebih lanjut sebagai berikut:

- a. Mengurangi hambatan dari lingkungan (fisik) yang membuat partisipasi penyandang disabilitas menjadi sangat terbatas. Seperti lingkungan fisik yang tidak dapat diakses, baik di sekitar pemukiman penduduk maupun di semua area publik.
- b. Menghilangkan hambatan sosial yang mempersulit akses partisipasi penyandang disabilitas. Hal ini meliputi sikap, perilaku, pandangan diskriminatif, dan stigma yang membuat penyandang disabilitas sulit untuk akses.
- c. Meningkatkan partisipasi penyandang disabilitas dalam pelayanan publik dengan mendorong, menginisiasi, dan memotivasi penyandang disabilitas untuk mau dan antusias mengakses layanan publik secara aktif. Hal ini termasuk memiliki keinginan untuk mengakses institusi pendidikan, kesehatan, pengembangan keterampilan dan potensi, serta sarana rekreasi.
- d. Jadikan semua layanan dan kebijakan publik responsif dan inklusif. Menciptakan lingkungan yang inklusif adalah cara agar penyandang disabilitas tetap dapat berpartisipasi dengan baik di lingkungannya.

Kebijakan responsif kini sudah bergulir dengan lahirnya Undang-Undang-Undang Penyandang Disabilitas yang berlaku secara nasional, terbitnya Peraturan Daerah (Perda) di beberapa daerah terkait penyandang disabilitas menunjukkan bahwa kebijakan di Indonesia sudah mulai responsif dalam memenuhi hak-hak penyandang disabilitas. Program-program penyandang disabilitas juga bermunculan seiring dengan lahirnya kebijakan tersebut.

Menurut Enung Huripah (2014:10), pekerja sosial dengan intervensi penyandang disabilitas memiliki fungsi dan tugas utama di antaranya yaitu

Membantu penyandang disabilitas meningkatkan dan menggunakan kemampuannya, mengkaitkan orang dengan disabilitas dalam berbagai sumber, memberikan fasilitas interaksi dan menciptakan hubungan baru dengan sistem sumber, mempermudah interaksi dan menciptakan hubungan di antara penyandang disabilitas di dalam lingkungan sistem sumber, memberikan sumbangan bagi kebijakan dan perundang-undangan sosial bagi penyandang disabilitas, serta pemeratakan atau menyalurkan sumber-sumber material.

Berdasarkan pendapat di atas, praktik pekerjaan sosial dengan disabilitas dilakukan dengan intervensi yaitu membantu penyandang disabilitas untuk meningkatkan dan/atau memberfungsikan secara sosial kembali dengan menghubungkan ke sistem sumber, mempermudah aksesibilitas fisik dan aksesibilitas non fisik, serta advokasi terhadap kebijakan bagi penyandang disabilitas.

5. Praktik Pekerjaan Sosial Makro

Pekerjaan sosial makro atau pekerjaan sosial komunitas adalah suatu bentuk praktik profesional yang bertujuan untuk mencapai perubahan terencana dalam organisasi dan komunitas. Praktik ini melibatkan

perencanaan, koordinasi, dan pengembangan berbagai kegiatan pembuatan program kemasyarakatan. Hal tersebut sesuai dengan pendapat Netting, dkk. (2017:1) yang mendefinisikan “praktik pekerja sosial makro sebagai intervensi yang dipandu secara profesional dan dirancang untuk membawa perubahan dalam organisasi, masyarakat, dan/ atau area kebijakan”. Dalam praktik pekerja sosial di aras makro terdapat pelibatan dari profesional lain dan masyarakat setempat seperti pemerintah lokal, tenaga medis, kader, ataupun Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS), serta instansi terkait lainnya yang saling bekerja sama mulai dari perancangan, pelaksanaan, hingga evaluasi terhadap program atau proyek tersebut.

Pekerjaan sosial di ranah komunitas memiliki model-model intervensi aras makro seperti yang diungkapkan oleh Rothman dalam Isbandi Rukminto Adi (2013:87) yaitu “pengembangan masyarakat, perencanaan sosial, dan pendekatan aksi sosial”. Model intervensi pekerjaan sosial aras makro dijelaskan lebih lanjut sebagai berikut:

- a. Pengembangan masyarakat berfokus pada tujuan yang berorientasi pada proses, di mana masyarakat diberdayakan dan kapasitasnya dikembangkan untuk secara kolaboratif memecahkan masalah mereka. Tujuan ini berdasarkan prinsip-prinsip demokratis yang mendorong masyarakat untuk saling membantu dan mengandalkan kemampuan mereka sendiri dalam mengatasi tantangan yang dihadapi.
- b. Perencanaan sosial memiliki penekanan pada tujuan yang berorientasi pada penyelesaian tugas. Proses perencanaan sosial biasanya terkait

dengan masalah sosial konkrit, dan nama-nama bagian (departemen) yang terlibat juga mencerminkan hal ini.

- c. Pendekatan aksi sosial mencakup baik tujuan yang berorientasi pada proses maupun yang berorientasi pada penyelesaian tugas. Beberapa organisasi aksi sosial fokus pada upaya membentuk peraturan baru atau mengubah praktik tertentu, yang pada akhirnya dapat menghasilkan modifikasi kebijakan organisasi-organisasi formal.

Peneliti berfokus pada intervensi aras makro dengan model pengembangan masyarakat dikarenakan sesuai dengan tujuan usulan program pada penelitian ini yaitu meningkatkan Aksesibilitas Informasi bagi Penyandang Disabilitas Sensorik Rungu melalui pendekatan inklusif sehingga informasi dapat diakses secara universal. Hal tersebut sesuai dengan pendapat Zubaedi (2013:5) yang mengemukakan tentang *community development* atau pengembangan masyarakat merupakan “upaya mengembangkan kondisi masyarakat secara berkelanjutan dan aktif berlandaskan prinsip keadilan sosial dan saling menghormati”. Selanjutnya, Netting dalam Zubaedi (2013) juga mengemukakan bahwa dalam praktik pekerjaan sosial aras makro terdapat strategi dan teknik intervensi komunitas yang dibagi menjadi tiga, yaitu “kerjasama (*collaboration*), kampanye sosial (*social campaign*) dan kontes (*contest*)”. Strategi dan taktik dalam praktik pekerjaan sosial aras makro dijelaskan lebih lanjut sebagai berikut:

- a. Kerjasama (*Collaboration*), adalah strategi pengembangan masyarakat yang digunakan ketika kelompok sasaran atau komunitas telah memahami tindakan yang perlu dilakukan dan setuju untuk melaksanakan kegiatan tersebut. Dalam kerjasama, komunitas sasaran memiliki kehendak dan kesepakatan bersama untuk berpartisipasi dalam kegiatan yang direncanakan. Taktik yang digunakan meliputi implementasi dan pengembangan kapasitas. Implementasi melibatkan kerjasama yang erat di mana rencana perubahan dapat diimplementasikan. Sementara itu, pengembangan kapasitas melibatkan dua taktik, yaitu perluasan partisipasi dan pemberdayaan kelompok-kelompok yang lemah.
- b. Kampanye Sosial (*Social Campaign*), adalah upaya untuk mempengaruhi anggota sistem sasaran agar mereka menyadari kebutuhan perubahan dan mengalokasikan sumber daya yang diperlukan. Taktik yang digunakan termasuk edukasi atau penyuluhan, persuasi, dan pemanfaatan media massa. Pendidikan atau penyuluhan digunakan untuk memberikan pemahaman kepada kelompok sasaran sehingga mereka dapat menerima dan terlibat aktif dalam perubahan yang akan dilakukan. Persuasi digunakan untuk meyakinkan dan memberikan gambaran bahwa kegiatan yang dilakukan sangat bermanfaat. Pemanfaatan media massa adalah taktik yang digunakan untuk membujuk atau mengubah persepsi kelompok sasaran dengan

memanfaatkan media massa yang tersedia atau media yang mudah diakses oleh kelompok sasaran.

- c. Kontes (*Contest*), adalah strategi yang dapat diterapkan ketika kelompok sasaran menghadapi masalah yang disebabkan oleh struktur kekuasaan yang menindas, tidak adil, dan merugikan kelompok mayoritas dalam masyarakat. Taktik yang digunakan meliputi advokasi, tawar-menawar, dan negosiasi. Advokasi adalah taktik di mana pekerja sosial berjuang untuk kepentingan kelompok sasaran dengan menawarkan persyaratan tertentu kepada pihak lain yang memiliki kekuasaan (seperti kelompok dominan, pemerintah daerah, lembaga legislatif, atau kelompok yang menindas), sebagai ganti kerugian yang dialami akibat pelaksanaan program tertentu.

Usulan program dalam penelitian ini menggunakan strategi kampanye sosial di mana sistem sasaran dipengaruhi melalui taktik edukasi, persuasi, dan pemanfaatan media massa agar menyadari jika kebutuhan terhadap perubahan dan alokasi sumber daya yang optimal benar-benar dibutuhkan untuk meningkatkan aksesibilitas informasi bagi penyandang disabilitas sensorik rungu melalui pendekatan inklusif sehingga informasi dapat diakses secara universal.

